

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
PENYELESAIAN PERMASALAHANNYA
(STUDI KASUS DI BMT AL-KAROMAH DI JATIPURNO)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

**DINDA SEKAR LANGIT
I000150007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN
KREDIT TANPA JAMINAN**

PUBLIKASI ILMIAH


Disusun Oleh:

DINDA SEKAR LANGIT

I000150007

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harun', written over a horizontal line.

Drs. Harun, MH

NIK.343

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
PENYELESAIAN PERMASALAHANNYA (STUDI KASUS DI BMT AL-
KAROMAH DI JATIPURNO)

Oleh:

DINDA SEKAR LANGIT

I000150007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 29 April 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Harun, M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Februari 2019

Penulis



Dinda Sekar Langit

I000150007

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
PENYELESAIAN PERMASALAHANNYA
(STUDI KASUS DI BMT AL-KAROMAH DI JATIPURNO)**

Abstrak

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati. Tidak ditutup kemungkinan pula dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah ditemukan kendala dan hambatan yang dihadapi baik pihak Bank maupun dari pihak debitur khususnya dalam hal ini peneliti akan mengkaji pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al-Karomah. Berdasarkan permasalahan diatas , telah dilakukan penelitian di BMT Al-Karomah, apakah pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al Karomah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah dan penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al-Karomah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di BMT Al-Karomah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al Karomah telah sesuai dengan rukun dan syarat murabahah dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dan mengedepankan musyawarah. Penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al-Karomah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah.

Kata kunci: akad murabahah, BMT Al-Karomah, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Abstract

Murabahah financing is an item sale and purchase transaction where the seller states the acquisition price to the buyer and the buyer pays the seller the acquisition price plus the agreed margin. There is also the possibility that the implementation of the murabahah financing agreement found obstacles and obstacles faced by the Bank and the debtor in particular in this case the researcher will examine the implementation of the murabahah financing agreement at BMT Al-Karomah. Based on the above problems, BMT Al-Karomah has conducted research, whether the implementation of the murabahah financing agreement at BMT Al Karomah is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Murabahah Financing and solving problems related to the implementation of the murabahah financing agreement at BMT Al-Karomah. In this study the author uses an empirical approach to the type of qualitative research. In this study the author took the location at BMT Al-Karomah. The data collection method used in this study is through observation and interviews. Data analysis is done qualitatively in the form of data in the form of words or sentences. The method of data analysis is done using deductive logic. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the

murabahah financing agreement at BMT Al Karomah is in accordance with the provisions of the pillar and murabahah and in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning murabahah financing and prioritizing considerations. Resolved a problem related to the implementation of the murabahah financing contract at BMT Al-Karomah in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning murabahah financing.

Keywords: murabahah contracts, BMT Al-Karomah, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

1. PENDAHULUAN

Murabahah diartikan sebagai sebuah transaksi yang pada intinya melakukan penjualan terhadap barang dengan memberitahukan secara jelas mengenai harga beli barang tersebut kepada pembeli yang kemudian akan dibayar pembeli tersebut dengan harga lebih atau margin keuntungan yang dianggap sebagai laba atau profit. Atau diartikan sebagai transaksi jual beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati. Kontrak murabahah dalam hal ini digunakan di dalam setiap mekanisme pembiayaan dimana terdapat komoditas barang yang bisa dispesifikasi menurut kategori tertentu untuk kemudian dijual kembali.

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan beberapa ketentuan mengenai murabahah yakni yang pertama adalah ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah, yang kedua berisi tentang ketentuan murabahah kepada nasabah, dan ketiga berisi tentang jaminan dalam murabahah. Penundaan pembayaran dalam murabahah dibahas dalam fatwa DSN No: 04/DSN - MUI/IV/2000 poin ke lima. Selain fatwa DSN No: 04/DSN - MUI/IV/2000 tersebut, MUI juga menerbitkan fatwa DSN mengenai metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah No: 84/DSN – MUI / XII / 2012. Metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan – ketentuan dalam fatwa ini.

Praktik akad murabahah pada bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati bank syariah dan nasabah. Perjanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah (debitur) untuk memberikan sejumlah dana kepada debitur. Pemberian pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah sangat beresiko, karena setelah dana pembiayaan diterima oleh debitur, maka pihak bank tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana, bank harus melaksanakan asas–asas pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan asas

kehati-hatian serta perlu melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. Tidak ditutup kemungkinan pula dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah ditemukan kendala dan hambatan yang dihadapi baik pihak Bank maupun dari pihak debitur khususnya dalam hal ini peneliti akan mengkaji pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al-Karomah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al-Karomah. Sehingga dengan demikian, penulis tertarik mengambil judul, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya (Studi Kasus di BMT Al-Karomah).”

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan dan keberlakuan hukum di masyarakat. Jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subyek peneliti, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengkomparasikan informasi dari narasumber melalui wawancara dari pihak BMT Al-Karomah dan observasi langsung di BMT Al-Karomah. Sumber data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, buku-buku, artikel, jurnal penelitian, tesis dan fatwa-fatwa ulama kontemporer terkait praktek perbankan syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pembiayaan, baik dalam pembiayaan akad murabahah dan lainnya, sering ditemukan permasalahan yang ditemui pihak perbankan syariah. Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, terdiri dari 2 (dua) pilihan. Pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah memenuhi beberapa kriteria bahwa nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restruktur (rescheduling, reconditioning atau restructuring). Jika kriteria ini dilakukan maka tahap selanjutnya adalah pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana restrukturisasi atas pembiayaannya.

Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah pembiayaan bermasalah, kemudian pihak bank akan melakukan evaluasi/ analisa restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan Analisa Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui pembahasan bersama. Strategi kedua dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan cara memutuskan hubungan dengan nasabah. Hal ini dilakukan apabila nasabah dinilai tidak kooperatif dan/atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Maka penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: Penyerahan Agunan/Aset (Offset) atau Litigasi yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan Perdata.

3.1 Gambaran Umum KSPPS BMT Al-Karomah di Jati Purno

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dan penyelesaian permasalahannya dengan penelitian atau studi kasus di BMT Al-Karomah, diperoleh hasil sebagai berikut: Berdasarkan data yang berhasil diperoleh dari BMT Al-Karomah tentang akad murabahah antara nasabah KSPPS BMT Al-Karomah dengan pihak BMT Al-Karomah, yakni salah satunya adalah akad murabahah bernomor NO. XVI.507. Isi dari Perjanjian akad murabahah NO. XVI.507 intinya adalah sebagai berikut:

Perjanjian akad murabahah NO. XVI.507 dibuat dan ditandatangani pada hari: Sabtu, 4 Agustus 2018 bertempat di Kantor BMT Al-Karomah oleh para pihak yakni Kiyanto sebagai General Manager yang berkantor pusat di Jatipurno sebagai pihak pertama dan Wakidi yang bertempat tinggal di Kuryo dan juga Samini dengan domisili yang sama dan selanjutnya bertindak sebagai pihak II. Yang menjadi objek dari akad tersebut adalah kendaraan isuzu panter tahun 1995 AD 8914 H atas nama Suryantoro MS dengan harga kurang lebih 32 juta yang disepakati diangsur dalam jangka waktu 36 bulan. Sehingga angsuran per bulan menjadi sekitar 900 ribu rupiah. Agunan yang dijanjikan dalam akad tersebut adalah BPKB Isuzu AD-8914-HF atas nama Suryantoro MS, dan juga SHM 935 dengan luas 925 atas nama Wakidi sebagai jaminan atas akad bagi hasil yang telah disepakati. Apabila dalam kewajiban terhadap pihak pertama, pihak kedua tidak bisa memenuhi, maka pihak kedua bersedia dan bertanggung jawab dalam melepaskan hak atas jaminan yang dijanjikan kepada pihak I, jika selama 2 periode angsuran pihak kedua tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sehingga mengakibatkan pihak I mempunyai hak untuk menarik jaminan dan atau menjualnya kepada pihak maupun untuk melunasi kewajiban pihak kedua.

Mengenai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah antara lain seperti keterlambatan anggota dalam membayar angsuran. Solusi atas permasalahan tersebut dari BMT Al-Karomah sendiri, adalah dengan memberikan teguran dalam bulan-bulan pertama hingga bulan ketiga,

namun untuk bulan ketiga seterusnya, pihak BMT Al-Karomah melanjutkan tindakan dengan mengunjungi anggota. Jika belum ada perubahan di bulan keempat, biasanya dari BMT Al-Karomah dikirimkan surat peringatan pertama, begitu hingga surat peringatan ketiga dikeluarkan. Namun dalam pelaksanaan selama ini, BMT Al-Karomah mengaku belum pernah menjalankan eksekusi jaminan anggota, sehingga solusi terakhir adalah dengan meminta anggota tersebut menjual sendiri barangnya tersebut.

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum membuat akad murabahah dengan pihak BMT Al-Karomah adalah dengan mengumpulkan persyaratan seperti KTP, KK, dan berkas-berkas lain yang perlu dikumpulkan dalam pembuatan akad murabahah. Namun yang harus tetap ada adalah barang yang dibutuhkan anggota, dan adanya kesepakatan harga dari anggota dengan harga jual dari anggota BMT yang disepakati, baru kemudian akad baru dapat dijalankan dengan dasar ridho baik dari anggota maupun dari pihak BMT Al-Karomah.

3.2 Analisis Praktek Murabahah di BMT Al-Karomah

Berdasarkan isi akad murabahah tersebut jika dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam aspek pertama tentang ketentuan umum murabahah, bahwa pembiayaan tersebut telah memenuhi aspek pertama, dimana akad tersebut bebas dari unsur riba, kemudian barang yang diperjualbelikan adalah sebuah mobil isuzu panter yang tidak diharamkan oleh syariah Islam. Kemudian BMT Al-Karomah membiayai pembelian panter tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp 32.960.000,- yang di atasnamakan BMT Al-Karomah sendiri kemudian tentang biaya yang diperlukan tentang harga pokok barang kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu, BMT Al-Karomah menyepakati angsuran sebesar Rp 915,556.00 yang akan dilunasi dalam jangka waktu 36 bulan. Sehingga berdasarkan Fatwa MUI tentang pembiayaan murabahah, akad pembiayaan murabahah yang dilakukan antara pihak I Kiyanto dan pihak II Wakidi dan Samini telah memenuhi unsur pertama tentang Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah.

Berdasarkan isi akad murabahah tersebut jika dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam aspek kedua tentang ketentuan murabahah kepada nasabah, akad pembiayaan murabahah yang dilakukan antara KIYANTO dan WAKIDI dan juga SAMINI juga telah memenuhi fatwa MUI. Bahwa dalam poin a nasabah dalam hal ini Wakidi dan Samini mengajukan permohonan pembelian isuzu panter kepada pihak BMT Al-Karomah, kemudian dalam poin b BMT Al-Karomah kemudian membeli mobil isuzu panter tersebut seharga kurang lebih 32 juta dan

kemudian menawarkan kepada nasabah dalam hal ini Wakidi dan Samini. Dalam poin d, dimana bank dibolehkan meminta nasabah membayar uang muka, dalam akad ini BMT Al-Karomah tidak meminta uang muka, namun melakukan kesepakatan dengan besaran angsuran sebesar Rp 915,556.00 yang akan dilunasi dalam jangka waktu 36 bulan. Pihak nasabah Wakidi dan Samini sama-sama menyepakati angsuran dan jangka waktu tersebut untuk dibayarkan kepada BMT Al-Karomah. Sehingga dalam hal ini akad murabahah yang dibuat di BMT Al-Karomah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam ketentuan kedua tentang ketentuan murabahah kepada nasabah.

Kemudian dalam akad pembiayaan murabahah yang dilakukan antara Kiyanto dan Wakidi bersama Samini berdasarkan kesesuaian dengan Fatwa MUI tentang ketentuan ketiga tentang jaminan dalam murabahah dimana, jaminan dalam murabahah dibolehkan dan bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan. Dalam hal ini pihak BMT Al-Karomah meminta kepada nasabah dalam menyerahkan agunan berupa BPKB ISUZU AD-8914-HF AN SURYANTORO MS.,SHM 935 LUAS 925 AN WAKIDI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad. Kemudian dalam aspek keempat tentang utang dalam murabahah, dimuat ketentuan bahwa dalam hal penyelesaian utang nasabah tidak ada kaitan dengan transaksi dalam hal nasabah menjual barang tersebut untuk dibayarkan kepada pihak BMT Al-Karomah. Sehingga dalam hal ini jika Wakidi dan Samini menjual mobil tersebut Isuzu Panter, baik mendapat untung maupun rugi, Wakidi dan Samini tetap memiliki kewajiban dalam membayar hutang kepada pihak BMT Al-Karomah.

Kemudian dalam aspek kesesuaian tentang poin kelima dalam Fatwa MUI tentang penundaan pembayaran dalam murabahah, apabila dalam hal nasabah menunda pembayaran dengan sengaja atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Namun dalam akad murabahah di BMT Al-Karomah jika pihak kedua selama dua periode angsuran tidak memenuhi kewajiban dalam mengangsur sesuai ketentuan, maka agunan yang diserahkan Wakidi dan Samini berupa BPKB ISUZU AD-8914-HF AN SURYANTORO MS.,SHM 935 LUAS 925 AN WAKIDI kemudian dilepaskan dan beralih menjadi milik BMT Al-Karomah dengan tetap mengutamakan musyawarah. Dan dalam hal pembayaran yang mengalami keterlambatan, pihak BMT Al-Karomah memberikan surat peringatan secara bertahap kepada pihak nasabah.

Sehingga berdasarkan poin keenam tentang bangkrut dalam murabahah yang dijelaskan bahwa jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Dalam hal akad murabahah antara Kiyanto dan Wakidi bersama Samini menyepakati bahwa apabila Wakidi tidak bisa menyelesaikan

kewajiban membayar hutang selama dua periode, maka agunan yang diserahkan akan beralih menjadi milik BMT Al-Karomah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad murabahah antara nasabah KSPPS BMT Al-Karomah dengan pihak BMT Al-Karomah bernomor NO. XVI.507 antara Kiyanto selaku General Manager dengan Wakidi dan Samini selaku nasabah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam poin pertama tentang ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah, poin kedua tentang ketentuan murabahah kepada nasabah, poin ketiga tentang jaminan dalam murabahah, poin keempat tentang utang dalam murabahah. Sementara dalam poin kelima tentang penundaan pembayaran dalam murabahah dan bangkrut dalam murabahah, pihak BMT Al-Karomah menerapkan penyelesaian permasalahan dengan peralihan kepemilikan agunan yang dimiliki nasabah kepada pihak BMT Al-Karomah dengan mengedepankan musyawarah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al Karomah telah sesuai dengan rukun dan syarat murabahah dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah. Penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al-Karomah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah.

4.2 Saran

Dalam pelaksanaan akad murabahah antara pihak BMT Al-Karomah dan pihak nasabah seharusnya lebih memuat hal-hal yang lebih detail dalam hal pembayaran hutang apabila pihak nasabah akan menjual kembali barang yang menjadi objek akad tersebut atau dalam hal nasabah mengalami pailit dalam membayar hutang tidak dimuat ketentuan penyelesaian melalui suatu badan arbitrase atau mengedepankan musyawarah. Mengenai kendala yang dihadapi pihak BMT Al-Karomah dalam hal keterlambatan pembayaran dari obyek yang dijanjikan, seharusnya pihak BMT Al-Karomah sebelum melakukan eksekusi barang yang dijadikan jaminan atau agunan, telah benar-benar mengutamakan atau mengedepankan musyawarah dengan nasabah sehingga keterlambatan pembayaran atau angsuran dapat lebih dihindari dengan memastikan kepada nasabah tentang kemampuan membayar hutang tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Kenny, "Analisis Faktor Penjelaras Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Fakultas Ekonomi Tahun 2018*

Ahmad Djazuli, 2002, *Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Grafindo Persada

- Ahmad Supriyadi, “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Sebuah Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Al-Mawardi*, Edisi X, (2003)
- Akad Murabahah Bernomor NO. XVI.507 di KSPPS BMT Al-Karomah
- Akhmad Mujahidin, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Faisal, “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No.3, (September, 2011)
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia,” *Al-Urban, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2017)
- Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press
- Nurul Qomariyah dan Iwan Triwuyono, “Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang,” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Malang, Universitas Brawijaya, (2014)
- Parno dan Tikawati, “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda,” *El-Jiyza, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economic Journal)*, Vol. 4, No.2, (Juli-Desember, 2016)
- Pristiyanto, Mochamad Hasjim, dan Soewarno. “Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang.” *Jurnal Manajemen IKM*. Volume 8, Nomor 1. Februari, 2013
- Rita Yuliana dan Nurul Herawati, “Dampak Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah,” *Jurnal InFestasi*, Vol. 10., No.2, (Desember, 2014)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.